PENUTUP

Pada Bab I sampai pada Bab III, penulis telah menggambarkan latar belakang penerapan pemberkatan nikah, pengertian pernikahan, deskripsi, menganalisis, serta merefleksikan secara tinjauan teologis dan implikasinya bagi tata gereja GKS. Selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang pernikahan.

A. Kesimpulan

Dalam peraturan Tata Gereja GKS di BAB VI pasal 16 tentang Sakramen Baptisan Kudus ayat 3, poin 3 yang berbunyi: “Baptisan dewasa asal Marapu bagi yang telah berumah tangga dengan sendirinya tidak dilakukan lagi pemberkatan nikah.” Tetapi dalam praktik atau realita yang terjadi di beberapa GKS, dan salah satunya di GKS jemaat Waikadada melayani pemberkatan nikah bagi orang marapu yang telah berumah tangga, sehingga bertentangan dengan aturan yang ada di GKS. GKS Jemaat Waikadada telah melayani pemberkatan nikah bagi suami-istri dari Marapu pasangan nikah sebanyak 107 KK (Kartu Keluarga).

Dengan demikian, adanya inkonsisten atau saling berbenturan antara penerapan pemberkatan yang dilaku GKS Jemaat Waikadada dan pokok peraturan GKS berbicara tentang baptisan dewasa asal Marapu yang telah berumah tangga, GKS tidak lagi melaksanakan atau melayankan pemberkatan nikah bagi mereka.

Bertolak dari hal ini, dalam pembahasan telah menguraikan sumber-sumber yang mendukung GKS Jemaat Waikadada melayani pemberkatan nikah bagi suami-istri dari Marapu. Sebagai berikut:

Yang *pertama*, pernikahan menurut Calvin, adalah sebuah gambaran kasih Allah yang mencakup keutuhan, kerja sama, dan kebersamaan yang harmonis. Calvin memandang pernikahan sebagai salah satu cara mewujudkan kasih Allah dan dinikmati oleh kedua pasangan, yang dapat menunjukkan hubungan antara Kristus dan gereja-Nya. Bagi Calvin, pernikahan terikat pada perjanjian yang bersifat sakral karena pernikahan telah diinstitusikan oleh Allah sendiri, dikuduskan dan diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya hubungan manusia semata tetapi hubungan manusia dengan Allah.

Yang *Kedua*, dari perspektif PL dan PB tentang pernikahan sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip teologis dalam pernikahan Kristen. Prinsip tersebut adalah yang *pertama*, pernikahan Kristen adalah untuk memuliakan Allah (Kejadian 1:28). *Kedua*, Seksualitas adalah anugerah Allah dan baik bagi manusia (laki-laki dan perempuan). Yang *ketiga* pernikahan Kristen melambangkan umat perjanjian.

Melihat esensi pernikahan secara Kristiani yang demikian, Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pemberkatan nikah secara Kristiani bagi mereka yang sudah melaksanakan upacara pernikahan di Marapu, maka sudah semestinya Gereja mengetahui pemaknaan Marapu tentang pernikahan untuk dapat menolong gereja (terkhususnya GKS) untuk bertindak secara tegas terutama dalam melayankan pemberkatan nikah sesuai ajaran Kristiani bagi jemaat.

Pernikahan bagi mereka yang menganut Marapu ialah untuk memelihara derajat atau kedudukan sosial dalam hal: memelihara dan mempertahankan hubungan kekeluargaan serta mempertahankan kedudukan dan pengaruh di dalam masyarakat. Adapun maksud dan tujuan pernikahan atau perkawinan bagi orang Marapu ialah untuk

memenuhi tuntutan Marapu (Dewa) dalam hal mengadakan keturunan dan menggiatkan kehidupan tolong menolong. Bagi Marapu, poligami merupakan suatu hal yang wajar. Realita ini tidak terlepas dari tujuan utama perkawinan dalam Marapu yaitu untuk memenuhi perintah nenek moyang (Marapu)

Pada akhirnya bagi penganut Marapu, pernikahan berorientasi pada Dewa yang mereka percayai dan bagi orang Kristen pernikahan berorientasi pada Allah dan Kristus sebagai Kepala Gereja. Lebih dari pada itu, bagi Marapu poligami itu diizinkan sedangkan bagi orang Kristen itu tidak diperkenankan. Yang tidak kalah penting ialah pelaksanaan pernikahan bagi orang Marapu yang di dalamnya melegalkan kumpul kebo dan juga yang melanggar HAM sangat bertolak belakang dengan pemaknaan dan pelaksanaan pernikahan secara Kristiani. Dua hal ini bagi orang Kristen adalah perbuatan menentang kehendak Allah atau tindakan dosa. Beberapa catatan ini sudah sangat cukup untuk menjadi alat ukur, mengapa gereja terkhususnya GKS harus melaksanakan pemberkatan nikah bagi suami-istri berasal Marapu yang telah dibaptis menjadi anggota gereja.

B. Saran

Saran ini penulis sampaikan kepada:

1. Gereja Kristen Sumba (GKS)

- Penulis mengusulkan rumusan pokok Eklesiologi tentang Keluarga sebagai landasan peraturan Pernikahan yang menjadi dasar ketika berbicara tentang pernikahan. Hal ini diperlukan sebab dalam tata gerejanya, GKS belum merumuskan pokok eklesiologi sebagai dasar ketika berbicara dan melakukan pelayanan pemberkatan nikah bagi keseluruhan jemaatnya yang melaksanakan pernikahan.

- Penulis juga mengusulkan agar GKS membuat rumusan peraturan baru perihal baptisan bagi orang dewasa asal Marapu

2. GKS Jemaat Waikadada

- Penulis mengusulkan agar Jemaat terus melakukan seminar tentang pernikahan bagi jemaat yang berasal Marapu dan bagi anak-anak muda
- Jemaat harus secara tegas menolak poligami dalam sebuah pernikahan